

POLITIK KETAHAHAN PANGAN

M. Yudi Candra

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Politics Food Security. The problems that occurred in Riau Province is currently the number of rice production in Riau Province is only able to meet about 45% of the total requirement keseluruhannya, thus making the Riau province is still dependent on the supply of rice from the neighboring province of North Sumatra, West Sumatra and Jambi. This condition is a result of the high activity of paddy land conversion into oil palm plantations that occurred in the province of Riau. Research on the effects of wetland conversion to oil palm plantations on Food Security in Riau province if the terms of the availability and regulatory aspects that emerged from the Riau provincial government in terms of realizing food security and in terms of inhibiting the rate of conversion of agricultural land. This study uses in-depth interviews addressed to several sources to answer on this issue. The speakers came from Riau Provincial Food Security Agency, Department of Agriculture and Livestock of Riau Province and the Central Statistics Agency of Riau Province. From the results of the interview obtained by the fact that the conversion of wetland into oil palm plantations in Riau province greatly affect the food security aspect of availability. In addition to the above, there are other facts obtained from these interviews were regulation is the case today where the Riau provincial government create a draft Regulation (Ranperda) about termination of activities over the function of agricultural land in Riau Province and is still awaiting approval from the House of Representatives (DPRD) of Riau Province.

Abstrak: Politik Ketahanan Pangan. Permasalahan yang terjadi di Provinsi Riau saat ini adalah angka produksi padi di Provinsi Riau hanya mampu memenuhi sekitar 45 % dari total kebutuhan keseluruhannya, sehingga membuat Provinsi Riau saat ini masih bergantung pada pasokan beras dari Provinsi tetangga seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi. Kondisi ini akibat dari tingginya aktivitas alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Provinsi Riau. Penelitian tentang pengaruh alih fungsi lahan sawah ke perkebunan kelapa sawit terhadap Ketahanan Pangan di Provinsi Riau jika ditinjau dari aspek ketersediaannya dan regulasi yang muncul dari Pemerintah Provinsi Riau dalam hal mewujudkan Ketahanan Pangan serta dalam hal menghambat laju alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode wawancara secara mendalam yang ditujukan ke beberapa narasumber untuk menjawab tentang permasalahan ini. Adapun narasumber tersebut berasal dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau dan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh fakta bahwa alih fungsi lahan sawah ke perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau sangat mempengaruhi Ketahanan Pangan dari aspek ketersediaannya. Selain hal yang diatas, ada fakta lain yang diperoleh dari wawancara tersebut yaitu regulasi yang terjadi saat ini dimana Pemerintah Provinsi Riau membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penghentian kegiatan alih fungsi lahan pertanian di Provinsi Riau dan saat ini masih menunggu pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau

Kata Kunci: ketahanan pangan, alih fungsi lahan, perekebunan kelapa sawit

PENDAHULUAN

Peningkatan Ketahanan Pangan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang selama ini masih diandalkan oleh Indonesia karena sektor pertanian mampu memberikan pemulihan dalam mengatasi krisis yang terjadi di Indonesia. Keadaan inilah yang menampakkan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang handal dan mempunyai potensi yang besar dan berperan sebagai pemacu pemulihan ekonomi nasional melalui salah satunya adalah

Ketahanan Pangan nasional, dengan demikian diharapkan kebijakan untuk sektor pertanian lebih diutamakan namun setiap tahun untuk luas lahan pertanian selalu mengalami alih fungsi lahan.

Padi atau beras mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan pertanian, baik secara nasional maupun regional. Hal ini disebabkan nilainya tidak hanya sekedar menjadi komoditas ekonomi tetapi juga menjadi komoditas politik yang memiliki dimensi sosial yang luas. *Roadmap Peningkatan Produksi Beras*

Nasional (P2BN) Menuju Surplus Beras 10 juta ton pada Tahun 2014 menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 sebesar 237.556.363 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,49 % mulai tahun 2011, maka pada tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sebesar 252.034.317 jiwa. Apabila konsumsi beras per kapita per tahun 139,15 kg pada tahun 2010 dan dengan laju penurunan konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 % maka kebutuhan beras pada tahun 2014 sebesar 33.013.214 ton. Dengan kebutuhan beras sebesar 33 juta ton pada tahun 2014, maka apabila harus ada surplus 10 juta ton, berarti harus ada produksi beras minimal 43 juta ton atau setara dengan 76,57 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) apabila konversi GKG ke beras sebesar 56,22 %. Produksi Gabah Kering Giling mencapai 76,57 juta ton pada tahun 2014, dengan capaian produksi GKG 66.469.394 ton (angka tetap 2010) maka dalam kurun 5 tahun (2010-2014) harus dicapai peningkatan produksi GKG sebesar 3,04 % per tahun.

Jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Riau sebanyak 5.538.367 jiwa yang terdiri dari 2.853.168 laki-laki dan 2.685.199 perempuan dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1.367.034 rumah tangga dan rata-rata penduduk per rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Selama periode 2000–2010, rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Riau meningkat sebesar 3,96 % per tahun. Pada periode yang sama, rata-rata pertumbuhan penduduk laki-laki dan perempuan meningkat sama besar yaitu sebesar 3,96 % per tahun dan jumlah rumah tangga meningkat sebesar 1,64 % per tahun.

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau termasuk pada kategori tertinggi di Indonesia. Meskipun Provinsi Riau berhasil dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang ditunjukkan dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga sebanyak 4 jiwa, tetapi laju pertumbuhan penduduk tetap tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi tertinggi dalam pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau dikarenakan tingginya migrasi dari luar provinsi

yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena bencana alam yang berasal dari Aceh dan Sumatera Barat dan mencari pekerjaan. Oleh karena itu, upaya pengendalian jumlah penduduk migrasi perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Pada tahun 2007 kebutuhan beras 552.275 ton dan pada tahun 2012 kebutuhan beras 594.922 ton atau meningkat 42.717 ton (7,18 %). Produksi beras pada tahun 2007–2010 meningkat dari 287.790 ton menjadi 363.314 ton atau meningkat sebanyak 75.524 ton (20,79 %). Pada tahun 2010 produksi sebanyak 363.314 ton menjadi 321.240 ton pada tahun 2012, turun 42.074 ton (-13,09 %). Ketergantungan akan pasokan dari daerah lain dan impor akan menjadi tidak baik dalam suatu daerah misalnya, pada komoditi beras. Beras merupakan bahan pangan utama. Bila hal ini tidak ditangani secepatnya, ketergantungan pada daerah lain dan impor akan semakin meningkat. Sementara itu pasar beras internasional sifatnya *thin market*, artinya ketergantungan terhadap daerah lain dan impor sifatnya tidak stabil dan akan menimbulkan kerawanan pangan dan pada gilirannya akan mengancam kestabilan nasional (Ilham dkk, 2003).

Fakta lain paling mutakhir petani juga dihadapkan pada persoalan semakin menyempitnya lahan pertanian. Nyatanya ada sekitar 120 ribu hektar lahan pertanian beralih fungsi pada setiap tahunnya. Pemerintah mewacanakan adanya reforma agraria dengan redistribusi lahan untuk petani miskin seluas 8,15 juta hektar, namun hampir berjalan dua tahun, tak kunjung jelas juga program ini. Alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu fenomena yang cukup banyak terjadi pada saat ini dalam pemanfaatan lahan. Hal ini disebabkan seiring dengan penambahan penduduk dan kegiatan pembangunan sehingga mengakibatkan semakin tinggi dan bertambahnya akan permintaan dan kebutuhan terhadap lahan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan kegiatan, baik sektor pertanian maupun sektor non pertanian. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi, bahwa pengguna selalu akan memaksimalkan penggunaan lahannya.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada tahun 2010 ternyata selama 8 (delapan) tahun terakhir terhitung kurun waktu Tahun 2002-2009 jumlah alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain cukup besar, yaitu 20.069,65 ha atau rata-rata setiap tahunnya 2.508,71 ha/tahun. Alih fungsi lahan yang banyak terjadi terutama dari lahan sawah ke perkebunan kelapa sawit yaitu sebesar 40,12 % (8.052,76 ha) atau rata-rata setiap tahunnya 1.006,6 ha/tahun yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Riau, yakni Indragiri Hulu, Kampar, Pelalawan, Rokan Hilir, Siak, Pelalawan, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, dan Indragiri Hilir.

Alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perkebunan kelapa sawit ini mulai dilakukan pada tahun 2002 dan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Tanaman sawit ini ditanam dilahan hak milik pribadi dan juga ditanam di pematang sawah sebagai batas lahan. Masyarakat juga ada yang menanam langsung di lahan yang dahulunya ditanami tanaman padi. Hal ini jika tidak segera diantisipasi tentunya akan mengancam ketahanan pangan untuk wilayah Provinsi Riau (*Riau Pos*, 29 Maret 2007). Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian melakukan audit lahan sawah dengan basis tingkat kecamatan melalui citra satelit pada tahun 2012. Dari hasil audit lahan tersebut didapatkan luas lahan sawah di Provinsi Riau seluas 86.119 ha dan estimasi sawah di dalam kawasan hutan seluas 24.048 ha, dan jika dijumlahkan, luas lahan sawah Provinsi Riau pada tahun 2012 seluas 110.166 ha.

Tingginya angka alih fungsi lahan pertanian ini berdampak pada penurunan produksi padi, penurunan itu terjadi akibat berkurangnya lahan pertanian sawah. Hal ini berpengaruh terhadap ketidakseimbangan penyediaan pangan di Provinsi Riau. Dari permasalahan tersebut dapat dilihat dampak dari pengaruh perubahan pemanfaatan lahan pertanian di Provinsi Riau. Dampak tersebut selain berpengaruh pada keseimbangan swasembada pangan juga berdampak pada struktur ruang yang ada, karena kabupaten-kabupaten yang telah ditetapkan sebagai kawasan sentra pangan dan juga sebagai

pusat pengembangan pertanian pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau telah mengalami alih fungsi lahan pertanian. Melihat kondisi dan permasalahan alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, maka perlu adanya peranan pemerintah Provinsi Riau didalam merumuskan konsep pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit didalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Provinsi Riau.

Menurut Lassa (2005) politik ketahanan pangan adalah suatu usaha negara di dalam mewujudkan Ketahanan Pangan bukan hanya persoalan produksi semata tetapi lebih kepada soal manajemen investarisasi lahan pertanian. Fachry Ali (*Republika*, 29 April 2015) menyatakan politik pangan adalah suatu usaha negara menjadi penyelenggara ketersediaan pangan bagi rakyatnya dengan tujuan agar pangan bisa dicapai seluruh masyarakat tanpa memerlukan usaha-usaha yang bersifat ekstra. Istilah ketahanan pangan (*food security*) sebagai sebuah konsep kebijakan baru pertama kali muncul pada tahun 1974, yakni ketika dilaksanakannya konferensi pangan dunia (Sage, 2002).

Penelitian tentang pengaruh alih fungsi lahan sawah ke perkebunan kelapa sawit terhadap Ketahanan Pangan di Provinsi Riau jika ditinjau dari aspek ketersediaannya dan regulasi yang muncul dari Pemerintah Provinsi Riau dalam hal mewujudkan Ketahanan Pangan serta dalam hal menghambat laju alih fungsi lahan pertanian.

METODE

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*in-depth interview*). Menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell, J (1998), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain. Pendekatan kualitatif di-

gunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dalam kondisi asli atau alamiah terkait dengan politik Ketahanan Pangan yang dipengaruhi oleh alih fungsi lahan lahan pertanian sawah ke perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau. Langkah selanjutnya, alur penelitian harus tetap dijaga agar obyek penelitian tetap pada konteks yang telah dibuat yang tercakup pada konstruksi teoritik. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya topik tidak dapat berdiri sendiri melainkan saling terkait dengan faktor-faktor didalamnya, selain itu agar obyek yang diteliti menjadi lebih spesifik namun tetap sesuai dengan konteks dan tahap akhir yaitu tahap generalisasi hasil dimana suatu kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis yang didukung oleh landasan teori dan data empiris yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Program Badan Ketahanan Pangan Konsep Ketahanan Pangan

Pelaksanaan pengembangan Ketahanan Pangan melibatkan banyak pelaku dari berbagai aspek serta mencakup interaksi antar wilayah, oleh sebab itu pengembangan dan pemantapan Ketahanan Pangan hanya dapat diwujudkan melalui suatu kerja kreatif dari seluruh pihak terkait. Koordinasi antara Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau didasarkan pada Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.101/HI/2007 yaitu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang bertugas membantu Gubernur dalam:

1. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Pusat.
2. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan Ketahanan Pangan.
3. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang dalam Keputusan Gubernur sebagai Sekretariat

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang bertugas sebagai fasilitator didalam agenda Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) tingkat Provinsi yang bertujuan untuk membangun koordinasi program-program Ketahanan Pangan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan juga sebagai forum strategis yang diadakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengevaluasi, mendiskusikan dan membahas permasalahan serta menetapkan langkah-langkah operasional dalam membangun Ketahanan Pangan.

Dalam upaya pemanfaatan sumber daya seperti (air, tanah, manusia, teknologi, kelembagaan, dll) dalam hal penyediaan, pendistribusian, akses dan konsumsi pangan perlu adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah, *stakeholder* dan seluruh sektor yang terkait, agar terwujudnya Ketahanan Pangan yang kuat..”

Pelaksanaan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui forum Rapat Dewan Ketahanan Pangan yang melibatkan Dinas/Badan selaku anggota DKP tingkat Provinsi yang terdiri dari:

- Rapat Koordinasi DKP Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Teknis Provinsi.
- Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Tenaga Ahli Provinsi.

Program Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau didalam mewujudkan Ketahanan Pangan yang mantap di Provinsi Riau melalui tugas dan fungsinya baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai pada aspek evaluasi akan selalu berupaya sekuat tenaga dan bekerjasama dengan seluruh pihak terkait baik internal maupun eksternal.

Peningkatan Ketahanan Pangan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab didalam mewujudkan Ketahanan Pangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemberdayaan masyarakat sangatlah penting. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap

ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya yang aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau terhadap daya beli masyarakat, sedangkan masyarakat berkewajiban melaksanakan aktifitas yang terkait dalam perwujudan Ketahanan Pangan seperti di dalam peningkatan produksi dan aktifitas distribusi pangan.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah didalam mewujudkan Ketahanan Pangan, yaitu:

1. Mengembangkan subsistem Ketahanan Pangan secara sinergis dan berkelanjutan di dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan tetap mengacu pada keunggulan komperatif dan potensi daerah, peluang dan mekanisme pasar yang kompetitif.
2. Mengembangkan wilayah/daerah yang memiliki potensi dengan mewujudkan kondisi yang kondusif penyediaan pelayanan dan insentif usaha yang mengacu pada sistem usaha tani dan komoditi terpadu untuk mempercepat pendapatan petani, merangsang dunia usaha dan perwujudan Ketahanan Pangan.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Bab II Pasal 7 ayat 2 (m) telah menerapkan bahwa Ketahanan Pangan merupakan Urusan Wajib Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan penguatan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 dimana pada pasal 13 disebutkan bahwa (Pemerintah Daerah melaksanakan Kebijakan dan Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan sesuai dengan tingkatan cakupan wilayah).

Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan

Berbagai indikasi yang terukur menunjukkan bahwa berbagai upaya dan kebijakan ketahanan pangan yang dilakukan selama ini telah memberikan dampak yang positif, kemudian dalam membangun ketahanan pangan tidak terlepas dari aspek ketahanan pangan, yaitu aspek ketersediaan. Peningkatan ketahanan pangan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.

Bahkan ketahanan pangan sudah menjadi isu Nasional yang harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak sebagai upaya penguatan kapasitas dan daya saing bangsa. Persoalan Ketahanan Pangan merupakan persoalan yang sangat rumit dan membutuhkan perhatian ekstra dari semua pihak. Terlebih lagi dengan semakin maraknya perubahan orientasi masyarakat untuk bekerja di sektor industri serta semakin banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi ke sektor lain dan berdampak pada rendahnya produksi padi di daerah dan minimnya ketersediaan beras di daerah khususnya di Provinsi Riau.

Peningkatan kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap pangan dasar berupa beras bergerak lebih cepat jika dibandingkan dengan peningkatan produksi padi yang ada di Provinsi Riau. Banyak faktor yang menjadi kendala di dalam peningkatan produksi dan produktivitas padi didalam memenuhi kebutuhan beras di Provinsi Riau salah satunya adalah tingginya konversi lahan sawah ke perkebunan kelapa sawit sehingga mengakibatkan rendahnya hasil produksi dan produktivitas padi di Provinsi Riau. Kebutuhan beras di Provinsi Riau saat ini sangat bergantung pada Provinsi tetangga seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi, hal ini dikarenakan rendahnya produksi padi di Provinsi Riau yang diakibatkan besarnya alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perkebunan kelapa sawit. Konversi lahan pertanian sawah menjadi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau sangat mempengaruhi Ketahanan Pangan dari aspek ketersediaan beras di Provinsi Riau karena besarnya luasan lahan sawah yang semakin berkurang yang mengakibatkan produksi padi rendah dan ketergantungan Provinsi Riau terhadap beras dari Provinsi tetangga menjadi semakin tinggi.

Alih fungsi lahan sawah ke lahan perkebunan menempati posisi pertama yaitu seluas 8.052,76 ha (40,12 %), berikutnya ke semak belukar/ditelantarkan seluas 3.360,40 ha (16,74 %), ladang/tegalan seluas 1.901,1 ha (9,47 %) dan ke pemukiman seluas 1.895,59 ha (9,45 %). Alih fungsi lahan dari sawah ke non sawah sangat tinggi terjadi di Provinsi Riau. Berdasarkan data studi alih fungsi lahan yang dilaksanakan oleh PT. Wastu Asrindo Riau Pada tahun 2010, diketahui

bahwa alih fungsi lahan sawah selama tahun 2002-2009 seluas 20.069,65 ha yaitu dari luas sawah 142.194,64 ha menjadi 122.125 ha. Jadi selama 8 tahun rata-rata laju alih fungsi lahan adalah 2.508,71 ha per tahun.

SIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau jika dilihat dari aspek ketersediaan salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian berupa sawah menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini berakibat besarnya luasan lahan sawah yang tadinya cukup besar menjadi berkurang dikarenakan konversi lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit dan tentunya hal ini juga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas padi di Provinsi Riau, sehingga sampai saat ini Provinsi Riau masih mengandalkan pasokan beras dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi untuk memenuhi ketersediaan beras. Politik Ketahanan Pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau saat ini dalam hal menghambat laju alih fungsi lahan pertanian sawah yaitu dalam bentuk pengajuan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau untuk selanjutnya digodok dan segera disahkan dan seterusnya dijadikan Peraturan Daerah. Hal ini sangat diperlukan supaya kegiatan alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perkebunan kelapa sawit tidak terjadi lagi.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah M. Syukur., 1986. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi Kebijakan*. Jakarta: P4N.

- AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edi Suharto, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Lassa, Jonatan. 2005. *Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1950-2005*. Artikel Ketahanan Pangan. Jakarta.
- Prayudho, 2009. *Teori Lokasi*. USU Press. Medan.
- Purnawijayanti, H, 2001. *Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja Dalam Pengelolaan Makanan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rian Nugroho., 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elek Media Komputindo
- Saily Ikhlās., 2012. *Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Siak-Riau*. Jurnal Pepustakaan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.
- Supriyadi, A. 2004. *Kebijakan Alih Fungsi Lahan dan Proses Konversi Lahan Pertanian*. Fakultas Pertanian IPB. Bogor.
- Suryana Achmad. 2014. *Dinamika Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2000-2014*. Jakarta: PP Perhepi.
- Syarif Mulkan., 2015. *Degradasi Lahan Sebabkan Riau Ketergantungan Pangan Daerah Lain*. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Willian N. Dunn., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.